BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, diharapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Institusi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang professional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pelayanan pun telah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan paradigma diatas menuntut daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatakan.

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting didalam pembangunan, disamping unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi. Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan.

Indonesia merupakan negara agraris sebagian besar penduduknya yang hidup di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, karena didukung kondisi tanah serta iklim di Indonesia para petani banyak sekali menghasilkan tanaman-tanaman yang diperlukan oleh masyarakat. Produk tersebut biasanya di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain, kegiatan ekspor ini akan menghasilkan devisa. Petani memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi pertaniannya tetapi karena banyak masalah yang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Luasnya lahan pertanian dengan tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani, namun taraf hidup petani di Indonesia belum maksimal. Kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sangat berpengaruh dalam mendukung para petani di pelosok-pelosok Desa.

Pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukan hasil yang maksimal jika dapat kita lihat dari kesejahteraan para petani dan pendapatan nasional yang dihasilkan dari sektor ini. Penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, selain itu bagian pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya ekspor nasional, dan besarnya, dan juga peranan petani yang menyediakan pangan bagi masyarakat. Petani masih belum merasakan kesejahteraan sampai saat ini.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Pemerintah harus melakukan pengembangan dan pembinaannya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kepercayaan diri bagi Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan dan kerja teknis pada masyarakat terutama pada masyarakat selaku petani.

Pengelolaan pada sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu upaya yang diarahkan agar dari pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan petani memberi dukungan yang baik, kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur. Peran aktif dari setiap bagian yang dilaksanakan di dalam Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Barat, dan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor DPKP Kaupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. DPKP memiliki fungsi untuk melaksanaka tugas diantaranya, yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Pengordinasian penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   (DPKP Kabupaten Bandung Barat)

Kinerja aparatur pemerintahan secara umum sering menjadi sorotan dari masyarakat.Aparatur pemerintahan dalam tugasnya selama ini, yang dipandang oleh masyarakat belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Masyarakat menilai terhadap kinerja aparatur pemerintah sangat rendah. Penyebabnya dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas. Kinerja aparatur pemerintah dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan, kurang adanya keterbukaan, kurang peka terhadap *social control*,

kurang taat hukum dan masih banyak hal lain yang harus ditingkatkan pelayanannya.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi. Kabupaten Bandung Barat memililki 16 wilayah Kecamatan dan 165 wilayah Desa, salah satunya yaitu Desa Pasirlangu yang berada di Kecamatan Cisarua, potensi petani komoditas holtikultura atau petani sayur-sayuran menjadi mayoritas di Desa Pasirlangu, berikut uraian matapencaharian masyarakat Desa Pasiralngu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasirlangu

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki(orang)	Perempuan(orang)
1.	Petani	3.987	638
2	Buruh Tani	657	186
3	Buruh Migran	3	4
4	Pengusaha kecil, menengah, dan besar	33	0
5	Pedagang Keliling	18	3
6	Pegawai Negeri Sipil	9	14
7	Pengrajin	5	1
8	Peternak	2	0
9	Montir	10	0
10	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	0

(Sumber : Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan tabel mata pencaharian masyarakat Desa Pasirlangu diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat Desa Pasirlangu yaitu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas pertanian yang ada di Desa ini antara lain: jamur, tomat, buncis, waluh dan cabai paprika. Komoditas pertanian tersebut menjadi sumber perekonomian utama di Desa Pasirlangu karena sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca yang ada di Desa Pasirlangu. Desa Pasirlangu letaknya

sedikit terpencil, namun perekonomian di Desa Pasirlangu belum dapat dikatakan maju. Berikut uraian jenis petani berdasarkan luas lahan di Desa Pasirlangu:

Tabel 4.2
Data Luas Lahan Petani Desa Pasirlangu

No	Nama Sayuran	Luas Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (Ha)	Luas Panen (Ha)		Luas Penanaman Baru/Tambah (Ha)	Luas Tanaman Akhir Bulan	Produk (kwintal)		Harga Jual Petani PerKilogram
			Habis/Dibongkar	Belum Habis			Dipanen/Habis Dibongkar	Belum Habis	
1	Waluh	146	29	49	32	149	4.300	15.400	Rp. 4.000
2	Jamur	135	20	35	-	1301	1.550	6.000	Rp.12.000
3	Cabai Paprika	22	3	25	-	19	996	1.560	Rp. 30.000
4	Tomat	20	5	19	3	18	1.250	1.000	Rp. 5.000
5	Buncis	15	6	5	8	17	690	400	Rp. 7.000

(Sumber: Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa petani waluh di Desa Pasirlangu merupakan salah satu komoditas petani memiliki luas lahan yang lebih luas dari komoditas petani lainnya, namu tidak menutup kemungkinan bahwa kesejahteraan petani waluh kurang terpandang.

Petani waluh menjadi mayoritas petani di wilayah Desa Pasirlangu, petani waluh tersebut keseluruhan merupakan petani pemilik lahan. Petani pemilik lahan merupakan petani yang memiliki lahan dan yang menggarap lahannya tersebut. Petani holtikultura salah satunya petani waluh yang kesejahteraan ekonominya rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari harga jual produk rendah yang didapatkan oleh petani waluh di Desa Pasirlangu, hal tersebut yang membuat petani waluh memiliki permasalahan baik dalam hal tanaman pangan maupun dalam hal pengolahan dan pemasaran.

Pendapatan hasil panen terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran, hal tersebut diakibatkan oleh hasil panen yang tidak terjual habis, dan kegagalan panen yang diakibatkan oleh serangan hama yang tidak teratasi dengan baik. Keuntungan yang didapatkan petani menurun , terkadang kurang untuk dijadikan modal tanam kembali.

Masyarakat yang selaku petani waluh di Desa Pasirlangu merasakan kesulitan, dengan begitu kemajuan para petani mengalami penghambatan. Salah satu penyebabnya diakibatkan karena, rendahnya kondisi perekonomian petani waluh Desa Pasirlangu, dan tidak sedikit dari mereka yang merasa tidak adanya bantuan dari pemerintah salah satunya bantuan berupa sarana dan prasarana. Hal tersebut menyebabkan petani sulit berkembang, dikarenakan pengetahuan yang tidak mumpuni. Namun seharusnya, mereka juga mendapatkan pembinaan yang intensif.

Petani Desa Pasirlangu salah satunya yaitu petani waluh tidak menjadi prioritas aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, permasaahan tersebut yang membuat tingkat kesejahteraan ekonomi petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu rendah. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu aparatur tingkat Kecamatan yang berhubungan langusng dengan petani.

Kesejahteraan petani menjadi salah satu visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat salah satunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat dan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Cisarua yang bertugas untuk melaksanakan

kegiatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani. BP3K merupakan salah satu pemerintah yang berhubungan langsung dengan petani khusunya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memperhatikan kinerja para pegawainya. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah senantiasa peduli terhadap perkembangan yang terjadi pada instansinya. Pada penelitian yang sebelumnya yaitu Rani Sulistiani (2009) yang berjudul *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Bagian kesekretariatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja, kinerja pegawai, dan besarnya pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah sasaran rencana target masih kurang dari realisasi target, kepeimpinan transformasional yang dijalankan Dinas Pertanian Tanaman Pangan kurang berjalan dengan baik, dan disiplin kerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang kurang baik.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Gaol (2011) yang berjudul *Analisis Luas Lahan Minimum untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani di daerah penelitian, pola pengeluaran petani, luas lahan minimum yang diusahakan petani dan bagaimana tingkat kesejahteraan petani di daerah penelitian. Hasil penelitian

menunjukan bahwa tingkat pendapatan di daerah penelitian sangat rendah dan bervariasi pada masing-masing strata, pada pola pengeluaran terbanyak digunakan pada kebutuhan makanan dan pada kebutuhan non makanan, pengeluaran terbanyak pada kebutuhan pendidikan. Luas lahan minimum yang harus diusahakan petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya didaerah penelitian 0,66 Ha dan tingkat kesejahteraan petani yang belum terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Permata Utami (2016) melakukan penelitian yang berjudul *Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Jagung di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pendapatan petani jagung di daerah penelitian, mengetahui tingkat kesejahteraan petani jagung didaerah penelitian , dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani jagung di daerah penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode tabulasi dan analisis statistika. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pendapatan petani jagung di Kecamatan Ketapang terdiri dari pendapatan usahatani dalam kegiatan budidaya (*on farm*), pendapatan usahatani yang berasal dari luar kegiatan budidaya jagung (*off farm*), dan pendapatan yang berasal dari kegiatan non pertanian (*non farm*). Tingkat kesejahteraan petani jagung di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan diukur dengan menggunakan metode Badan Pusat Statistik (BPS) 2007 didapat hasil bahwa 84 persen petani masuk kedalam kategori sejahtera dan 16 persen petani masuk kedalam kategori belum sejahtera. Tingkat kesejahteraan petani jagung di

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh luas kepemilikan lahan dan tingkat pendidikan petani.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan maupun kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti buat salah satu perbedaan pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa penelitian bertujuan untuk menganalisis luas lahan minimum, mengetahui kinerja aparatur dalam menangani segala keluhan para petani, dan untuk mengetahui usaha petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Tujuan penelitian yang memiliki kesamaan dari penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaiamana kesejahtaeraan petani, mengetahui tingkat pendapatan petani dan mengetahui bagaiamana petani potensi yang dimiliki petani.

Hasil uraian yang peneliti jelaskan diatas mengenai kinerja maupun kesejahteraan petani, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam penyusunan Skripsi yang berjudul **"Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Studi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Wilayah Desa Pasirlangu)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang peneliti angkat dari skripsi ini adalah bagaimana kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di

wilayah Desa Pasirlangu dilihat dari indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualitas kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
3. Untuk mengetahui inisiatif Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
4. Untuk mengetahui kemampuan kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
5. Untuk mengetahui komunikasi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya.

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khusunya bagi Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Guna Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan informasi dan masukan bagi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini instansi terkait bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

   a. Guna Bagi Lembaga

      Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat dan aparatur Balai Penyuluhah Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Cisarua yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat

mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

b. Guna Bagi Peneliti

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain terutama mengenai kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

c. Guna Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat selaku petani waluh di Desa Pasirlangu terutama mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

d. Guna Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.